

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Rani Helfina
NPP. 30.0212

*Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

E-mail: ranihelfinaa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Natural disasters are disasters caused by events or a series of events caused by nature, such as the earthquake disaster that occurred in February 2023 in West Pasaman Regency which resulted in a lot of damage to various sectors of community activities and buildings suffered severe damage, so the Government has an obligation to carry out rehabilitation and reconstruction in earthquake disaster management. **Purpose:** The purpose of this study was to determine how the implementation of Government policies on rehabilitation and reconstruction programs after the West Pasaman Regency earthquake disaster. **Methods:** This research uses descriptive research with a qualitative approach. Which is useful for collecting data related to the implementation of the Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction program in West Pasaman Regency, West Sumatra. **Result:** The results of this study are the rehabilitation and reconstruction program activities carried out in West Pasaman Regency, namely in the form of socialization to the community about the implementation of the rehabilitation and reconstruction program so that the implemented program can be achieved as well as by maximizing existing resources in the community and providing clear information provided to the community so that the program can be carried out properly. **Conclusion:** suboptimal human resource capabilities, lack of facilities needed, lack of socialization to the community so that the lack of information received by the community, lack of coordination and communication, and lack of optimal service delivery.

Keywords: Program; rehabilitation and reconstruction

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti bencana gempa bumi yang terjadi pada bulan Februari tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan banyak kerusakan berbagai sektor kegiatan masyarakat serta bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana gempa bumi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan

Pemerintah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Pasaman Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang berguna untuk mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini yaitu kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar program yang dilaksanakan dapat tercapai serta dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat dan pemberian informasi jelas yang diberikan kepada masyarakat agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. **Kesimpulan:** kemampuan sumber daya manusia yang kurang optimal, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal.

Kata kunci: Program; rehabilitasi dan rekonstruksi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap bencana. Secara geologi Indonesia merupakan jalur *Pacific Ring Of Fire* yaitu jalur gunung api aktif di dunia. Tercatat ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan wilayah yang rawan terhadap gempa maupun tsunami, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi sebagai akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan gelombang seismik. Gempa bumi umumnya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng). Jenis dan ukuran gempa yang dialami di suatu wilayah dari waktu ke waktu disebut sebagai frekuensinya. Gempa bumi besar dapat menyebabkan tanah longsor, bangunan runtuh dan retak dan kerusakan lainnya yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Gempa yang melanda wilayah Sumatera Barat pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 08.39 WIB berkekuatan 6,1 skala Richter dan berpusat di utara Gunung Talamau dengan koordinat $99,98^{\circ}$ BT dan $0,15^{\circ}$ LU pada kedalaman 10 km (M6,2). Getarannya bisa dirasakan hingga Riau dan Malaysia dan kabupaten dan kota sekitar Kabupaten Pasaman Barat seperti Pasaman, Agam, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, dan Aek Godang, yang menyebabkan banyaknya kerusakan yang dialami oleh bencana gempa bumi tersebut.

Di wilayah Kabupaten Pasaman Barat terdapat 1.111 unit rumah yang mengalami rusak berat, 1.171 unit rumah dengan rusak sedang dan 2.172 unit rumah rusak ringan, menurut Plt. Kepala BPBD Kabupaten Pasaman Barat, kerusakan yang parah dialami di Kecamatan Talamau dan Kecamatan Pasaman. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu pemecahan masalah yang sempurna supaya masalah tersebut bisa selesai. Target saat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada peraturan yang diaturlah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu tiga tahun lamanya. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan disebabkan karena gempa Bumi yang dialami oleh masyarakat daerah Kabupaten

Pasaman Barat banyak mengakibatkan rumah atau tempat tinggal mengalami rusak berat dan harus secepatnya diperbaiki, namun hal tersebut tidak akan tercapai kalau tidak dilaksanakannya pendataan lebih lanjut mengenai infrastruktur dan tempat tinggal yang mengalami kerusakan, pendataan ini sangat penting dilakukan karena pendataan tersebut akan menjadi syarat mutlak dalam penentuan pengajuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi serta anggaran ini tidak sama dengan dana siap pakai melainkan anggaran yang diajukan apabila data yang diperlukan sudah lengkap. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat yang terkena dampak tragedi tersebut tidak lagi menderita.

Untuk mengawal Prosedur pemulihan dan pasca gempa Pasaman Barat pemerintah daerah membangun posko crisis centre rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana dan tempat hunian sementara bagi masyarakat (Huntara) yang di desain untuk para korban gempa, menargetkan 2.500 tempat tinggal, dari bambu, kayu, dan terpal untuk korban gempa yang gudangnya rusak parah di Nagari Kajai. dan menjadi penyambung asa warga yang sudah beberapa waktu tinggal di bawah terpal dan tenda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sudah memberikan bantuan kepada korban bencana terutama untuk perbaikan rumah rusak berat yang akan dibangun dengan sistem reimburse yang dibantu oleh aplikator dan tentunya rumah ramah gempa, yang apabila gempa bumi terjadi lagi tidak mengalami kerusakan yang begitu berat, dan untuk bantuan terhadap rumah yang rusak sedang akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan rusak ringan akan dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan fungsi prasarana dan sarana penting, meningkatkan status sosial ekonomi awal masyarakat, dan pemerintah daerah juga telah mulai membangun gedung HUNTARA (tempat penampungan sementara) bagi korban terdampak gempa di Kabupaten Pasaman Barat.

Fase pemulihan dan rekonstruksi pascagempa Pasaman Barat Februari 2022 masih berlangsung. Namun, pencairan bantuan moneter stimulus bagi korban bencana dan pembangunan rumah permanen di Pasaman Barat belum selesai. Berbagai sengketa muncul, terutama terkait dana stimulus serta pembangunan rumah permanen, dan beberapa upaya telah digiatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk pulih dari gempa Pasaman Barat. Berdasarkan data-data yang diberikan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terkena dampak bencana gempa bumi dengan mengambil judul “Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasaman Barat”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu kemampuan sumber daya manusia yang kurang optimal, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti pertama penelitian Ni Kmg Tri Purwati (2022) berjudul Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rehabilitasi Pasca Gempa di Kabupaten Donggala, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan program pemulihan dan pembangunan kembali pascagempa di Kabupaten Donggala, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah. Penelitian kedua Lidya Christin Sinaga (2013) berjudul Problematika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Studi Kasus Bencana Tsunami Mentawai 2010 yaitu penelitian ini membahas tentang prioritas program rehabilitasi dan rehabilitasi tsunami Mentawai ditetapkan hanya untuk lima sektor yaitu perumahan dan infrastruktur perumahan, infrastruktur publik, ekonomi, masyarakat dan sektor. Dan yang ketiga penelitian Nastasia Thalia Sigarlaki, Sarah Sambiran Dan Trintje Lambey (2017) yaitu dengan judul Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado. Penelitian ini menjelaskan tentang tahapan atau tahapan dalam penyaluran bantuan, mulai dari sosialisasi, pendataan dan validasi, pendistribusian iuran dana rehabilitasi dan pemulihan, rekonstruksi, dan pertanggung jawaban.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni implementasi oleh George C. Edward III (1980) dengan beberapa indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada mitigasi bencana banjir. Pendekatan induktif digunakan yakni pendekatan yang awalnya bersifat umum atau luas kemudian mengarah pada sifat yang khusus, dari elemen yang luas akan lebih mengecil atau lebih spesifik, termasuk mencari cara penyelesaian masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk bukti, catatan atau foto dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang didapatkan dalam penelitian implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pengimplementasian program rehabilitasi dan rekonstruksi ada beberapa tahapan dimulai dari sosialisasi, pendataan dan verifikasi, penyaluran dana, pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, kinerja BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi sangat perlu dibahas dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kinerja BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan program tersebut melalui beberapa indikator menurut George C. Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi).

3.1 Komunikasi

Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik. Keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dapat dilihat dari sejauh mana komunikasi yang dijalankan oleh para pelaksana itu transparan dan juga konsisten sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas sehingga tujuan dari penyampaian itu juga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga implementor dapat mengetahui apa yang dilakukan apabila implementasi tersebut terjadi secara efektif. Satu-satunya cara bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mengetahui apa yang akan mereka capai adalah melalui komunikasi yang efektif, yang juga menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat. Dalam situasi ini, pemerintah pusat harus melakukan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pada akhirnya masyarakat.

3.2 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (Staf)

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas aturan kebijakannya apabila sumberdaya manusia nya tidak memadai atau kurang terlatih maka pasti tidak akan berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan jika dalam pengimplementasian itu tidak memiliki sumberdaya yang efektif, dan akan membuat pekerjaan pun tidak berjalan dengan efektif. Staf atau pegawai, atau lebih tepatnya birokrat di tingkat bawah, merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan.

2. Sosialisasi berupa informasi dari pemerintah

Informasi datang dalam dua bentuk saat mengambil kebijakan. Pertama, informasi tentang bagaimana mempraktekkan kebijakan pelaksana perlu memahami apa yang harus dilakukan ketika diberikan instruksi. Kedua, detail tentang bagaimana data pelaksana tentang kesesuaian dengan hukum dan peraturan dikumpulkan. Ketika kepatuhan terhadap hukum pihak lain yang berpartisipasi dalam implementasi diketahui, pelaksana harus mengetahuinya.

Agar pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi memahami apa yang akan dilakukan dalam kebijakan ini, maka harus ada sosialisasi dari pemerintah ketika kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini dibuat. Sosialisasi ini berupa informasi yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dan bagaimana prosedur pelaksanaannya.

3. Kewenangan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Legitimasi atau kewenangan pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan. Agar proses implementasi tidak gagal karena implementor dianggap oleh publik tidak dapat dipercaya, otoritas harus bersifat formal. Namun, ketika disalahgunakan oleh pelaksana untuk memajukan tujuan mereka sendiri atau kelompok, otoritas dapat kehilangan sebagian dari keefektifannya dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan penerapan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Fasilitas Alat

Implementasi kebijakan melibatkan banyak faktor yang berbeda, termasuk fasilitas fisik. Pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil tanpa bantuan sarana dan prasarana yang memadai, meskipun pelaksana memiliki cukup banyak orang, mengetahui apa yang harus dilakukan, dan memiliki kewenangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa infrastruktur pendukung juga diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan selama implementasi. seperti pembelian bahan bangunan, seperti semen, batu, besi dan kayu, serta material lainnya. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi akan sangat terhambat jika alatnya kurang atau mengalami masalah seperti kerusakan.

3.3 Disposisi

Disposisi ini digambarkan sebagai sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edward III, agar berhasil mengimplementasikan suatu kebijakan, pelaksana tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi mereka juga perlu memiliki motivasi untuk melakukannya. Menurut Edward III, berikut ini adalah faktor penting yang harus diperhitungkan saat menghitung variabel disposisi:

1. Kurang adanya Disiplin Pegawai Operator

Mereka yang berkomitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, lebih-lebih pada kepentingan rakyat, harus dipilih dan diangkat sebagai pegawai pelaksana kebijakan. Sikap atau disposisi pelaksana akan mempersulit tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan jika mereka tidak menginginkannya. Jika pemerintah kabupaten mengambil kebijakan untuk mempekerjakan pegawai dengan mengacu pada pengimplementasian program rehabilitasi dan rekonstruksi, maka wajib juga memilih pegawai yang berdedikasi untuk melaksanakan program tersebut. Pelaksanaan program ini tidak akan berfungsi dengan baik jika penanggung jawabnya tidak memiliki dedikasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

2. Insentif

Edward III merekomendasikan penggunaan insentif sebagai salah satu strategi untuk memerangi kecenderungan sikap pelaksana kebijakan. Orang sering bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, oleh karena itu mengubah insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan mereka yang menerapkan kebijakan. Dimungkinkan untuk memberi insentif kepada pelaksana kebijakan agar dapat melaksanakan perintah secara memadai dengan memasukkan imbalan atau pengeluaran khusus.

3.4 Struktur Birokrasi

Meskipun semua sumber diatas sudah dipenuhi, namun belum tentu implementasi program ini dapat terlaksana dengan efektif. Ini akibat ketidakefisienan struktur birokrasi pada saat ini. Berdasarkan yang terjadi di lapangan diperkirakan bahwa semakin buruk struktur birokrasi di lokasi penelitian, maka semakin efektif pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pasaman Barat, begitu pula sebaliknya, semakin rendah struktur birokrasi maka semakin efektif program rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sangat penting untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan. SOP juga dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja dari program rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Sedangkan penerapan SOP dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki berbagai tujuan, antara lain mengidentifikasi potensi penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi, mengoreksi penyimpangan tersebut, dan meningkatkan kinerja ke tingkat yang lebih tinggi menjadi efektivitas, efisiensi, profesionalisme, transparansi, dan handal.

b. Fragmentasi dalam implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi

Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat sangat dipengaruhi oleh fragmentasi atau penyebaran tugas kegiatan. Hubungan yang berkembang di antara para pelaksana kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan; jika interaksi dalam lingkungan birokrasi ini tidak positif, keberhasilan kebijakan bisa jadi akan tidak baik pula. Penyebarluasan tugas para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya bekerja sama, bersaing, dan saling membantu secara sehat dilakukan guna membangkitkan minat untuk mencapai keberhasilan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan adanya pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada masyarakat memberikan dampak positif diberbagai lapisan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memberikan informasi dan juga bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang berguna untuk mengurangi dampak besar akibat terjadinya bencana. Temuan yang penulis dapatkan yaitu

masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program sosialisasi tersebut yang dikarenakan faktor pendidikan, sosial budaya dan juga perekonomian.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa fakta yang terdapat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten pasaman Barat yaitu dari Februari tahun 2022 sampai sekarang masih banyak yang belum terimplementasikan dalam hal pembangunan rumah rusak dan masih banyak juga yang dalam proses pembangunan dikarenakan ada beberapa kesalahan serta kekurangan di lapangan sehingga menyebabkan program menjadi terhambat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023 maka peneliti menyimpulkan bahwa Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang pelaksanaan program yang dilaksanakan, Tidak kompeten dan profesionalnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat. Serta kurang optimalnya dalam melayani masyarakat dan keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan pada saat kebijakan itu dilaksanakan, Adanya ketidaksiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat serta Struktur birokrasi saat ini tidak efisien karena tidak semua fungsinya dilakukan oleh pemerintah formal, tetapi juga dilakukan oleh pihak non formal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin. L.,2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Christin, Lidya. 2013. *Problematika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Studi Kasus Bencana Tsunami Mentawai 2010*. Pusat Penelitian Politik LIPI

- Kurnia, M. L. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. *Pagaruyung Law Journal*, 1(1), 76-91.
- Mulyadi, D. 2016. “*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*”. Alfabeta: Bandung
- Nazir.2011. “*Metode Penelitian*”. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurdin, Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung. Alfabeta, cv
- Purwati, Ni Kmg Tri.2022.*Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah*. IPDN
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sigarlaki dkk. 2017. *Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado*.Sam Ratulangi University
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

